

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TATA KARYA INDONESIA

2025

Dengan komitmen pada kinerja dan integritas, kami menyajikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola untuk periode 2025. Laporan ini menegaskan fokus kami pada transparansi serta pengelolaan yang bertanggung jawab dalam setiap aktivitas perusahaan.

Kunjungi laman kami
www.banktki.com



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	BPR Tata Karya Indonesia
Alamat	Komplek 35, Jl. Jembatan Tiga Blok A- B, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor Telepon	(021)6622017

Penjelasan Umum:

Transparansi penerapan tata kelola BPR (Bank Perekonomian Rakyat) mencakup pengungkapan informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan, praktik, dan kinerja BPR kepada pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan BPR.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Secara keseluruhan, peringkat komposit 2 (baik) mencerminkan bahwa BPR memiliki praktik tata kelola yang memadai, tetapi masih perlu berupaya untuk meningkatkan berbagai aspek guna mencapai standar yang lebih tinggi dalam tata kelola perusahaan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Lidianty Simbolon
	<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Direktur:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. <p>Direktur Operasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan menentukan, merumuskan, dan memutuskan sebuah kebijakan dalam operasional perusahaan menyusun dan menetapkan berbagai strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan operasional di perusahaan mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan menjadi perwakilan perusahaan yang berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan <p>Direktur YMF Kepatuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan 	

- prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
- b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan
 - c. memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain
 - d. memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
 - e. melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
 - f. melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko pada setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank selalu diupayakan dalam posisi sehat.
- c. Monitor kepada seluruh debitur terutama yang memiliki kredit kualitas rendah sudah dilaksanakan.
- d. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti di tahun 2025.
- e. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal kontrol dalam melaksanakan tugas masing-masing.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Feryanto Njomin
	<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Dewan Komisaris memiliki peran yang krusial dalam memastikan penerapan Tata Kelola yang baik di seluruh kegiatan usaha BPR. Bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tugas Direksi, memberikan nasihat, serta mengarahkan dan mengevaluasi kebijakan strategis. Meskipun Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan operasional, mereka memiliki kewenangan untuk memberikan masukan terkait penyediaan dana dan hal-hal lain yang diatur oleh perundang-undangan.</p> <p>Dewan Komisaris juga wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari berbagai pihak, serta melaporkan pelanggaran atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu yang ditentukan.</p> <p>Selain itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencakup etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat, serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dengan demikian, Dewan Komisaris berperan penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keberlanjutan operasional BPR.</p>	
2.	Nama	Hendra Nugraha
	<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Dewan Komisaris memiliki peran yang krusial dalam memastikan penerapan Tata Kelola yang baik di seluruh kegiatan usaha BPR. Bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tugas Direksi, memberikan nasihat, serta mengarahkan dan mengevaluasi kebijakan strategis. Meskipun Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan operasional, mereka memiliki kewenangan untuk memberikan masukan terkait penyediaan dana dan hal-hal lain yang diatur oleh perundang-undangan.</p> <p>Dewan Komisaris juga wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari berbagai pihak, serta melaporkan pelanggaran atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu yang ditentukan.</p> <p>Selain itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencakup</p>	

etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat, serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dengan demikian, Dewan Komisaris berperan penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keberlanjutan operasional BPR.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Memberikan mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Tata Karya Indonesia.
- d. Memonitor secara ketat kepada debitur agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.
- e. Memastikan semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK di tindaklanjuti sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Lidianty Simbolon
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Feryanto Njomin
	Persentase Kepemilikan (%)	95,00
2.	Nama	Hendra Nugraha
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Lidianty Simbolon
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Feryanto Njomin
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Hendra Nugraha
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Lidianty Simbolon
	Nama Bank/Perusahaan Lain	-
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Feryanto Njomin
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. Wahana Karya Suplaindo
	Persentase Kepemilikan (%)	95,00
2.	Nama	Feryanto Njomin
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. Wahana Danau Indah
	Persentase Kepemilikan (%)	90,00

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Lidianty Simbolon
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Feryanto Njomin
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Hendra Nugraha
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Feryanto Njomin
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Lily Njomin
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Lidianty Simbolon
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
---	-----------

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Feryanto Njomin
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Hendra Nugraha
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Feryanto Njomin
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Anak
2.	Nama	Lily Njomin
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ibu

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp260.000.000

Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp245.700.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0
2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0
2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0
2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0
2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya	Rp0

Komisaris (Rp)

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 3,00 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 1,00 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 1,00 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 2,00 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 3,00 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	03 Maret 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: 1. Rencana Bisnis 2. Isu Strategis 3. Evaluasi Kebijakan 4. Penyelesaian Permasalahan yang ada 5. Laporan Manajemen Risiko	
2.	Tanggal Rapat	03 Maret 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: 1. Rencana Bisnis 2. Isu Strategis 3. Evaluasi Kebijakan 4. Penyelesaian Permasalahan yang ada 5. Laporan Manajemen Risiko	
3.	Tanggal Rapat	14 Maret 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

	<p>Topik/Materi Pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Bisnis BPR TW II 2. Isu Strategis 3. Evaluasi Kebijakan 4. Penyelesaian Permasalahan yang ada 5. Pembentukan CKPN 	
4.	Tanggal Rapat	14 Maret 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	<p>Topik/Materi Pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Bisnis BPR TW II 2. Isu Strategis 3. Evaluasi Kebijakan 4. Penyelesaian Permasalahan yang ada 5. Pembentukan CKPN 	
5.	Tanggal Rapat	18 September 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	<p>Topik/Materi Pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Bisnis 2. APU-PPT 3. Isu Strategis 4. Evaluasi Kebijakan 5. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis 6. Penyelesaian Permasalahan yang Ada 7. Laporan Manajemen Risiko 	
6.	Tanggal Rapat	18 September 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	<p>Topik/Materi Pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Bisnis 2. APU-PPT 3. Isu Strategis 4. Evaluasi Kebijakan 5. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis 6. Penyelesaian Permasalahan yang Ada 7. Laporan Manajemen Risiko 	
7.	Tanggal Rapat	10 Desember 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	<p>Topik/Materi Pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Bisnis 2. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis 3. APU-PPT 4. Pengkinian Data 5. Isu Strategis 6. Evaluasi Kebijakan 7. Penyelesaian Permasalahan yang Ada 8. Laporan Manajemen Risiko 	

	Tanggal Rapat	10 Desember 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Bisnis 2. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis 3. APU-PPT 4. Pengkinian Data 5. Isu Strategis 6. Evaluasi Kebijakan 7. Penyelesaian Permasalahan yang Ada 8. Laporan Manajemen Risiko 	
9.	Tanggal Rapat	07 Maret 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan pengesahan laporan keuangan PT. BPR Tata Karya Indonesia tahun 2024 atas laporan hasil audit eksternal (KAP Yohan H. Wibowo) 2. Pengesahan atas alokasi laba tahun 2024 3. Pembahasan terkait pemberian fasilitas lain kepada Direksi dan Komisaris sesuai dengan POJK no.9 tahun 2024 Penerapan Tata Kelola BPR. 	
10.	Tanggal Rapat	17 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	Perpanjangan masa jabatan Ibu Lidianty Simbolon, selaku direktur Operasional yang juga membawahkan fungsi kepatuhan	
11.	Tanggal Rapat	05 November 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan informasi keuangan atas posisi keuangan tahun 2025	

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Feryanto Njomin
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	11 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hendra Nugraha
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	11 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Selama periode tahun 2025 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR Tata Karya Indonesia

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	7 kasus
---	---------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
--	---------

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	6 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nihil

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	08 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PERBARINDO
	Penjelasan Kegiatan	PERBARINDO PEDULI BENCANA ALAM DI SUMATERA UTARA DAN BARAT DAN ACEH
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR Tata Karya Indonesia untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Maret 2026

PT BPR Tata Karya Indonesia

Ttd

Lidianty Simbolon
Direktur

Ttd

Feryanto Njomin
Komisaris Utama

Ttd

Hendra Nugraha
Komisaris